

**WACANA KEBIJAKAN TAPERA PADA MEDIA ALTERNATIF
(ANALISIS WACANA KRITIS TULISAN TAPERA PADA MEDIA
KORAN PERDJOEANGAN.COM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas

Oleh:

Lutfia Azzahra

2110861011

Pembimbing:

Yayuk Lestari, M.A

Rinaldi, M.I. Kom.



DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

ABSTRAK

WACANA KEBIJAKAN TAPERA PADA MEDIA ALTERNATIF (ANALISIS WACANA KRITIS TULISAN TAPERA PADA MEDIA KORAN PERDJOEANGAN.COM)

Oleh:

**Lutfia Azzahra
2110861011**

Pembimbing:

**Yayuk Lestari, M.A
Rinaldi, M.I. Kom.**

Kebijakan Tapera disahkan oleh pemerintah sebagai respon atas tingginya masalah backlog perumahan dan lewat kebijakan Tapera, pemerintah berniat untuk membantu masyarakat memiliki rumah. Agar kebijakan ini dapat terlaksana, pemerintah mewajibkan masyarakat yang menjadi peserta kebijakan Tapera untuk mengiur sebanyak tiga persen setiap bulan yang dipotong melalui upah yang diterima. Namun, respon masyarakat atas kebijakan ini kurang baik, terutama dari kalangan buruh yang berpendapat bahwa kebijakan Tapera menambah beban finansial mereka karena adanya kewajiban iuran setiap bulan. Suara buruh tersebut umumnya tidak diakomodasi oleh media arus utama karena digunakan oleh kelompok penguasa untuk menyampaikan pemikiran mereka. Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji media alternatif yang memang menyuarakan suara buruh dan berpihak pada buruh. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis wacana kebijakan Tapera di media alternatif Koran Perdjoengan dengan memakai analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk dan menjelaskan bagaimana media Koran Perdjoengan ini dalam menyampaikan isu kebijakan Tapera di media mereka. Kemudian akan digunakan juga teori hegemoni untuk melihat hegemoni pemerintah dalam kebijakan Tapera dan bagaimana kontra hegemoni atau perlawanan timbul dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, wacana penolakan Tapera di media Koran Perdjoengan muncul karena adanya serangkaian pengalaman kolektif buruh yang selalu mengalami ketidakadilan. Pada kebijakan Tapera, buruh hanya dianggap sebagai objek kebijakan, bukan sebagai manusia atau korban penindasan kebijakan.

Kata Kunci: analisis wacana kritis, buruh, media alternatif, pemerintah, tapera

ABSTRACT

DISCUSSION OF TAPERA POLICY ON ALTERNATIVE MEDIA (CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF TAPERA IN MEDIA OF KORAN PERDJOEANGAN.COM)

By:

**Lutfia Azzahra
2110861011**

Supervisors:

**Yayuk Lestari, M.A
Rinaldi, M.I. Kom.**

The Tapera policy is a policy released by the government in response to the high problem of housing backlogs and through Tapera policy, the government intends to help its people to own homes. In order for Tapera policy to be implemented, the government requires people who are participants in the Tapera policy to donate as much as three percent each month which is deducted through the wages received. However, this policy does not receive any good respond from the public, especially among the working class who argued that Tapera policy will increase their financial burden due to the monthly dues obligations. These workers' voices are generally not accommodated by mainstream media because these media are used by the ruling group to convey their own thoughts. Therefore, this research will examine alternative media that conveys the voices of workers and side with them. The purpose of this study is to analyze the discourse of Tapera policy in alternative media of koran Perdjoengan by using Teun A. Van Dijk critical discourse analysis and explains how koran Perdjoengan media conveyed the issue of Tapera policy in their media. Then hegemony theory will also be used to see government hegemony in Tapera policy and how kontrahegemonism or resistance arises from society. Based on the results of the research conducted, the discourse of rejection of Tapera in the media of the Perdjoengan Newspaper emerged due to a series of collective experiences of workers who always experienced injustice. In Tapera policy, workers are only considered as policy objects, not as humans or victims of policy oppression.

Keywords: alternative media, critical discouse analysis, goverment, labour, tapera